

II. LANDASAN TEORI

2.1 Implikatur

Istilah implikatur diturunkan dari verba *to imply* yang berarti menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Secara etimologis, *to imply* berarti membungkus atau menyembunyikan sesuatu dengan menggunakan sesuatu yang lain. Oleh karena itu, implikatur percakapan adalah sesuatu yang disembunyikan dalam sebuah percakapan, yakni sesuatu yang secara implisit terdapat dalam penggunaan bahasa secara aktual (Rusminto, 2009: 70).

Selanjutnya, Lubis (1991: 67) menyatakan bahwa implikatur adalah arti atau aspek arti pragmatik. Dengan demikian, hanya sebagian saja dari arti literal (harfiah) itu yang turut mendukung arti sebenarnya dari sebuah kalimat, selebihnya berasal dari fakta-fakta yang ada (dunia ini) baik situasi maupun kondisi.

Kemudian, Brown dan Yule (1996: 31) menyatakan bahwa implikatur digunakan untuk menerangkan apa yang mungkin diartikan, disarankan, atau dimaksudkan oleh penutur sebagai hal yang berbeda dengan apa yang sebenarnya dikatakan oleh penutur. Sejalan dengan hal ini, Samsuri (dalam Rusminto, 2009: 71) mengemukakan bahwa implikatur percakapan digunakan untuk

mempertimbangkan apa yang dapat disarankan atau yang dimaksudkan oleh penutur sebagai hal yang berbeda dari apa yang tampak secara harfiah. Sebagai contoh, interaksi antara Andi dan Badu pada percakapan berikut menunjukkan bahwa Badu tidak memberikan tanggapan secara langsung terhadap apa yang dituturkan oleh Andi, tetapi pernyataan Badu yang menyatakan bahwa ia telah membayar uang SPP memberikan implikasi bahwa Andi tidak bisa meminjam uang kepada Badu karena uang Badu sudah habis untuk membayar SPP.

- (1) Andi : *Bud, pinjam uang dong?*
 Budi : *Kemarin aku abis bayaran SPP.*

2.1.1 Sumbangan Implikatur

Levinson (dalam Rusminto, 2009: 72) mengemukakan bahwa setidaknya terdapat empat sumbangan implikatur percakapan terhadap interpretasi tindak tutur tidak langsung.

- 1) Implikatur percakapan dapat memberikan penjelasan fungsional yang bermakna terhadap fakta-fakta kebahasaan yang tidak terjangkau oleh teori-teori linguistik formal.
- 2) Implikatur percakapan dapat memberikan penjelasan eksplisit terhadap adanya perbedaan antara tuturan yang dituturkan secara lahiriah dengan pesan yang dimaksudkan, sementara pesan yang dimaksudkan tersebut dapat saling dimengerti dan dipahami oleh penutur dan mitra tutur, seperti pada contoh percakapan berikut.

- (2) A : *Rio sudah berangkat ngisi tinta spidol belum ?*
 B : *Spidol yang diatas meja guru sudah nggak ada tuh.*

3) Implikatur percakapan dapat menyederhanakan pemerian semantik dari perbedaan antarklausa meskipun klausa-klausa tersebut dihubungkan dengan kata-kata yang sama seperti pada contoh-contoh berikut.

- (3) *Rara berdiri di depan kelas dan membacakan puisi.*
- (4) *Tomi bermain di luar kelas dan Sandi bermain di dalam kelas.*

Meskipun kedua kalimat tersebut menggunakan kata hubung yang sama *dan*, kedua kalimat tersebut memiliki hubungan klausa yang berbeda. Contoh pada kalimat (3), susunannya tidak dapat dibalik, sedangkan pada kalimat (4), susunannya dapat dibalik menjadi (4a) *Sandi bermain di dalam kelas dan Tomi bermain di luar kelas*. Hubungan klausa kedua kalimat tersebut dapat dijelaskan secara pragmatik dengan menggunakan dua perangkat implikatur yang berbeda yaitu pada kalimat (3) terdapat hubungan ‘lalu’, sedangkan pada kalimat (4) terdapat hubungan ‘demikian juga’.

4) Implikatur percakapan dapat menjelaskan berbagai fakta yang secara lahiriah tidak berhubungan dan saling berlawanan, implikatur percakapan dapat menjelaskan mengapa kalimat pernyataan seperti pada contoh (5) dapat saja bermakna perintah seperti pada contoh (6).

- (5) *Rapih sekali tulisanmu.*
- (6) *Kacau sekali tulisanmu, cepat rapihkan.*

Mitra tutur harus memiliki pemahaman yang sama tentang kenyataan-kenyataan tertentu yang berlaku dalam kehidupan. Pada contoh percakapan (5), misalnya, untuk dapat memahami implikatur dalam percakapan tersebut diperlukan pemahaman bersama antara penutur dan mitra tutur bahwa tulisannya tidak rapih dan sulit untuk dibaca sehingga perlu dirapihkan agar mudah dibaca.

Grice (dalam Rusminto, 2009: 73) mengemukakan bahwa untuk sampai pada suatu implikatur percakapan, penutur dan mitra tutur harus mengembangkan suatu pola kerja sama yang mengatur hak dan kewajiban penutur dan mitra tutur sehingga terjadi kerja sama yang baik antara penutur dan mitra tutur demi keberlangsungan komunikasi sesuai dengan yang diharapkan. Pola kerja sama tersebut dikenal sebagai prinsip kerja sama. Disamping itu, Grice juga mengingatkan bahwa prinsip kerja sama tersebut perlu dilengkapi dengan prinsip yang lain yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial dan keramahan hubungan dalam komunikasi, yakni prinsip sopan santun.

2.2 Tindak Tutur

Dalam kajian pragmatik, tindak tutur merupakan hal yang sangat penting. Menurut Chaer dan Agustina (2004: 50) tindak tutur merupakan gejala individual bersifat psikologis, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Kajian tindak tutur tertuju pada makna atau arti tindakan dalam tuturan.

Selanjutnya Searle (dalam Rusminto, 2009: 74) mengemukakan bahwa tindak tutur adalah teori yang mencoba mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada hubungan tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh penuturnya. Kajian tersebut didasarkan pandangan bahwa (1) tuturan merupakan sarana utama komunikasi dan (2) tuturan baru memiliki makna jika direalisasikan dalam tindak komunikasi nyata, misalnya membuat pernyataan, pertanyaan, perintah atau permintaan.

2.2.1 Jenis-jenis Tindak Tutur

Tindak tutur dibagi atas beberapa jenis. Tindak tutur yang dilangsungkan dengan kalimat performatif oleh Austin (dalam Rusminto, 2009: 75) dirumuskan sebagai tiga peristiwa tindakan yang berlangsung sekaligus, yaitu (1) tindak lokusi (*locutionary acts*), (2) tindak ilokusi (*illocutionary act*), (3) tindak perlokusi (*perlucutionary act*). Dalam hal ini, untuk mengkaji jenis-jenis tindak tutur digunakan teori Wijana dan Rohmadi (2010: 28) yang membagi tindak tutur berdasarkan langsung tidaknya tuturan dan berdasarkan literal tidaknya tuturan.

2.2.1.1 Tindak Tutur Langsung dan Tindak Tutur Tidak Langsung

Secara formal, berdasarkan modusnya, kalimat dibedakan menjadi kalimat berita (deklaratif), kalimat tanya (interogatif), dan kalimat perintah (imperatif). Secara konvensional kalimat berita digunakan untuk memberitakan sesuatu (informasi), kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, dan kalimat perintah untuk menyatakan perintah, ajakan, permintaan, atau permohonan. Tindak tutur langsung (*direct speech act*) adalah tindak tutur yang terbentuk akibat penggunaan ketiga jenis kalimat tersebut difungsikan secara konvensional. Seperti dalam tuturan (7), (8), dan (9) berikut.

- (7) *Rara mendapat peringkat pertama.*
- (8) *Apakah yang dibeli Alfi di koperasi sekolah?*
- (9) *Tutup pintu kelas itu!*

Ketiga tuturan tersebut merupakan tindak tutur langsung berupa tuturan berita (7), tuturan tanya (8), dan tuturan perintah (9). Tindak tutur tidak langsung adalah tindak tutur yang digunakan untuk memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu secara tidak langsung. Tindak tutur ini memanfaatkan tuturan berita atau

tuturan tanya agar orang yang diperintah tidak merasa dirinya diperintah dan berkesan lebih sopan. Untuk ini dapat dilihat tuturan (10) dan (11) di bawah ini.

(10) *Ada makanan di tasku.*

(11) *Di mana sapunya?*

tuturan (10), bila diucapkan kepada seorang teman yang membutuhkan makanan, dimaksudkan untuk memerintah lawan tuturnya mengambil makanan yang ada di tas yang dimaksud, bukan sekadar untuk menginformasikan bahwa di tas ada makanan. Demikian pula tuturan (11) bila diutarakan oleh seorang guru kepada siswanya, tidak semata-mata berfungsi untuk menanyakan di mana letak sapu itu, tetapi juga secara tidak langsung memerintah siswanya untuk mengambil sapu itu.

Dari uraian di atas skema penggunaan modus tuturan dalam kaitannya dengan kelangsungan tindak tutur dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2.1. Modus Kalimat Langsung dan Tidak Langsung

Modus	Tindak Tutur	
	Langsung	Tidak Langsung
Berita	Memberitakan	Menyuruh
Tanya	Bertanya	Menyuruh
Perintah	Memerintah	-

Skema di atas juga menunjukkan bahwa tuturan perintah tidak dapat digunakan untuk mengutarakan tuturan secara tidak langsung.

2.2.1.2 Tindak Tutur Literal dan Tindak Tutur Tidak Literal

Tindak tutur literal adalah tindak tutur yang maksudnya sama dengan makna kata-kata yang menyusunnya, sedangkan tindak tutur tidak literal adalah tindak tutur yang maksudnya tidak sama dengan atau berlawanan dengan makna kata-kata

yang menyusunnya. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan kalimat (12) dan (13) berikut.

- (12) *Suaramu merdu sekali.*
- (13) *Suaramu merdu sekali tetapi lebih baik jika kau diam.*

Kalimat (12) bila diutarakan untuk maksud memuji atau mengagumi suara seseorang yang dibicarakan, merupakan tindak tutur literal, sedangkan (13), karena penutur memaksudkan bahwa suara lawan tuturnya tidak merdu dengan mengatakan *tetapi lebih baik jika kau diam*, merupakan tindak tutur tidak literal.

2.2.2 Interseksi Berbagai Jenis tindak Tutur

Wijana dan Rohmadi (2010: 31) mengemukakan bahwa bila tindak tutur langsung dan tidak langsung disinggungkan dengan tindak tutur literal dan tindak tutur tidak literal, akan didapatkan tindak tutur-tindak tutur berikut.

2.2.2.1 Tindak Tutur Langsung Literal (*Direct Literal Speech Act*)

Tindak tutur langsung literal adalah tindak tutur yang diutarakan dengan modus tuturan dan makna yang sama dengan maksud pengutaraannya. Maksud memerintah disampaikan dengan kalimat perintah, memberitakan dengan kalimat berita, menanyakan sesuatu dengan kalimat tanya, dan sebagainya. Untuk ini dapat diperhatikan kalimat (14) s.d. (16) berikut.

- (14) *Rio adalah ketua kelas.*
- (15) *Hapus tulisan itu!*
- (16) *Sudah bel istirahat belum?*

Tuturan (14), (15), dan (16) merupakan tindak tutur langsung literal bila secara berturut-turut dimaksudkan untuk memberitakan bahwa Rio adalah ketua kelas, menyuruh agar lawan tutur menghapus tulisan, dan menanyakan sudah bel

istirahat belum ketika itu. Maksud memberitakan diutarakan dengan kalimat berita (14), maksud memerintah dengan kalimat perintah (15), dan maksud bertanya dengan kalimat tanya (16).

2.2.2.2 Tindak Tutur Tidak Langsung Literal (*Indirect Literal Speech Act*)

Tindak tutur tidak langsung literal adalah tindak tutur yang diungkapkan dengan modus kalimat yang tidak sesuai dengan maksud pengutaraannya, tetapi makna kata-kata yang menyusunnya sesuai dengan apa yang dimaksudkan penutur.

Dalam tindak tutur ini, maksud memerintah diutarakan dengan kalimat berita atau kalimat tanya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat kalimat (17) dan (18) di bawah ini.

- (17) *Lantai ruang kelas kotor.*
- (18) *Di mana alat pelnya?*

Dalam konteks seorang guru berbicara dengan siswanya pada (17), tuturan ini tidak hanya menginformasikan tetapi terkandung maksud memerintah yang diungkapkan secara tidak langsung dengan kalimat berita. Makna kata-kata menyusun (17) sama dengan maksud yang dikandungnya. Demikian pula dalam konteks seorang guru bertutur dengan siswanya pada (18) maksud memerintah untuk mengambilkan alat pel diungkapkan secara tidak langsung dengan kalimat tanya, dan makna kata-kata yang menyusunnya sama dengan maksud yang dikandung.

2.2.2.3 Tindak Tutur Langsung Tidak Literal (*Direct Nonliteral Speech Act*)

Tindak tutur langsung tidak literal adalah tindak tutur yang diutarakan dengan modus kalimat yang sesuai dengan maksud tuturan, tetapi kata-kata yang

menyusunnya tidak memiliki makna yang sama dengan maksud penuturnya. Maksud memerintah diungkapkan dengan kalimat perintah, dan maksud menginformasikan dengan kalimat berita. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan kalimat berikut.

(19) *Kalau duduk biar kelihatan sopan, buka saja kakimu!*

Dengan tindak tutur langsung tidak literal penutur dalam (19) menyuruh lawan tuturnya yang mungkin dalam hal ini teman perempuannya yang mengenakan rok untuk merapatkan kaki sewaktu duduk agar terlihat sopan.

Data (19) menunjukkan bahwa di dalam analisis tindak tutur bukanlah apa yang dikatakan yang penting, tetapi bagaimana cara mengatakannya.

2.2.2.4 Tindak Tutur Tidak Langsung Tidak Literal (*Indirect Nonliteral Speech Act*)

Tindak tutur tidak langsung tidak literal adalah tindak tutur yang diutarakan dengan modus kalimat dan makna kalimat yang tidak sesuai dengan maksud yang hendak diutarakan. Untuk menyuruh siswanya untuk merapihkan bangku yang tidak teratur, seorang guru dapat saja dengan nada tertentu mengutarakan kalimat (20). Demikian pula untuk menyuruh temannya mematikan atau mengecilkan volume radionya, penutur dapat mengutarakan kalimat tanya (21) berikut.

(20) *Rapih sekali bangku di kelas ini.*

(21) *Apakah radio yang pelan seperti itu dapat kau dengar?*

Akhirnya secara ringkas Wijana dan Rohmadi (2010: 35) mengikhtisarkan bahwa tindak tutur dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi,

1. tindak tutur langsung,
2. tindak tutur tidak langsung,

3. tindak tutur literal,
4. tindak tutur tidak literal,
5. tindak tutur langsung literal,
6. tindak tutur tidak langsung literal,
7. tindak tutur langsung tidak literal,
8. tindak tutur tidak langsung tidak literal.

2.2.3 Modus Tuturan

Secara fungsional, berdasarkan modulusnya dalam berimplikatur, modus tuturan yang digunakan cenderung berbeda dengan modus tuturan yang dimaksud oleh penutur. (Wijana dan Rohmadi, 2010: 30).

1) Modus berita, digunakan untuk memberitakan sesuatu. Secara fungsional, dalam tindak tutur tidak langsung literal maupun tidak langsung tidak literal, modus berita digunakan untuk memerintah. Misalnya,

(25) *Meja guru belum dirapihkan.*

Tuturan (25) menggunakan modus berita, tetapi dalam berimplikatur tuturan tersebut sebenarnya bermaksud memerintah, sehingga modus berita tidak hanya sekedar digunakan untuk menginformasikan bahwa meja guru belum dirapihkan melainkan untuk memerintah agar meja guru dirapihkan.

1) Modus tanya, digunakan untuk bertanya. Secara fungsional, dalam tindak tutur tidak langsung literal maupun tidak langsung tidak literal, modus tanya digunakan untuk memerintah. Misalnya

(26) *Di mana tempat sampahnya?*

Tuturan (26) menggunakan modus tanya, tetapi dalam berimplikatur tuturan tersebut sebenarnya bermaksud memerintah, sehingga modus tanya tidak hanya sekedar digunakan untuk menanyakan letak kotak sampahnya melainkan untuk memerintah agar membuang sampah pada tempatnya.

Dalam kenyataan yang ada, modus yang digunakan seseorang dalam berimplikatur menurut Rusminto (2010: 77) dapat diperinci lagi, seperti modus menyatakan fakta, modus menyarankan, modus ancaman, modus menyapa, modus menyatakan keluhan, dan modus 'ngelulu'. Sebenarnya masih ada beberapa modus yang mungkin digunakan seseorang untuk mendukung tindak tutur tidak langsungnya, hal ini bergantung dengan keadaan sekitar penutur dan mitra tutur pada saat peristiwa tutur berlangsung. Penggunaan modus dalam tindak tutur tidak langsung bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara penutur dan mitra tutur sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik dan lancar.

a. Modus Bertanya

Modus bertanya merupakan modus yang digunakan seseorang dalam berimplikatur dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu kepada mitra tutur. Pertanyaan-pertanyaan tersebut Pertanyaan yang disampaikan tersebut digunakan sebagai sebuah cara untuk menyampaikan sesuatu atau memerintah.

b. Modus Menyatakan Fakta

Modus menyatakan fakta pada penelitian ini adalah modus yang digunakan dalam berimplikatur berupa pernyataan fakta yang dilakukan subjek penelitian dalam

tuturannya. Pernyataan fakta tersebut berupa kejadian atau peristiwa yang terjadi nyata pada saat percakapan berlangsung.

c. Modus Menyarankan

Modus menyarankan menyarankan merupakan modus yang digunakan dalam berimplikatur yang berupa tuturan memberi saran tentang suatu hal yang dituturkan oleh subjek penelitian kepada mitra tutur.

d. Modus Mengancam

Modus mengancam merupakan modus yang digunakan dalam berimplikatur, yaitu dengan memanfaatkan suatu ancaman yang berupa sumpah, pemberian sanksi serta hal-hal lain yang bersifat mengancam agar mitra tutur mau melakukan apa yang dikehendaki penutur.

e. Modus Menyapa

Modus menyapa merupakan modus yang digunakan dalam berimplikatur yang disampaikan melalui sapaan. Penutur memiliki maksud lain pada saat menyapa mitra tuturnya. Biasanya maksud yang diinginkan penutur sudah dimengerti oleh mitra tutur. Jadi maksud yang diinginkan penutur dapat tersampaikan dengan baik.

f. Modus Menyatakan Keluhan

Mengeluh adalah menyatakan sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa diri sendiri. Biasanya berupa ungkapan ketidakberdayaan diri dalam mengatasi

sesuatu yang tidak menyenangkan tersebut. Jadi modus mengeluh merupakan modus yang digunakan dalam berimplikatur yang digunakan penutur untuk maksud tertentu dengan cara menyatakan hal tidak menyenangkan yang dialami oleh penutur dalam kaitannya dengan sesuatu yang diinginkannya dan tidak sanggup mereka atasi sendiri.

g. Modus “Ngelulu”

Modus “ngelulu” merupakan modus yang digunakan dalam berimplikatur yang digunakan oleh penutur untuk menyampaikan suatu hal dengan cara mengiyakan pendapat atau pandangan mitra tutur secara berlebihan dan mengemukakan sesuatu yang berlawanan dengan kenyataan yang diharapkan oleh penutur.

2.3 Prinsip-prinsip Percakapan

Dalam kegiatan komunikasi hak dan kewajiban penutur dan mitra tutur harus diatur sedemikian rupa. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan terjadinya komunikasi yang baik dan lancar antara penutur dan mitra tutur.

Upaya untuk menciptakan hubungan komunikasi yang diharapkan antara penutur dan mitra tutur tersebut diperlukan prinsip yang mengatur hubungan tersebut, yaitu prinsip-prinsip percakapan.

Dalam kegiatan komunikasi yang wajar, penutur tidak hanya bermaksud untuk mencapai tujuan pribadi melainkan juga tujuan sosial. Dengan demikian, kajian analisis wacana tidak cukup hanya didasarkan pada prinsip kerja sama, tetapi juga harus dilengkapi dengan prinsip sopan santun dan prinsip-prinsip tindak sosial

yang lain agar penutur dan mitra tutur dapat terhindar dari kemacetan komunikasi (Rusminto, 2009: 88).

2.3.1 Prinsip Kerja Sama

Grice (dalam Rusminto, 2009: 89) berpendapat bahwa dalam berkomunikasi seseorang akan menghadapi kendala-kendala yang mengakibatkan komunikasi tidak berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu dirumuskan pola-pola yang mengatur kegiatan komunikasi. Pola-pola tersebut dikenal dengan istilah prinsip kerja sama (*cooperative principles*). Prinsip kerja sama mengatur hak dan kewajiban penutur dan mitra tutur dalam berkomunikasi sehingga tercipta komunikasi yang baik dan lancar. Prinsip kerja sama berbunyi *Buatlah sumbangan percakapan Anda sedemikian rupa sebagaimana diharapkan; pada tingkatan percakapan yang sesuai dengan tujuan percakapan yang disepakati, atau oleh arah percakapan yang sedang Anda ikuti.*

Prinsip kerja sama yang dikemukakan oleh Grice (dalam Rahardi, 2005: 52) meliputi empat maksim, yaitu (a) maksim kuantitas (*maxim of quantity*), (b) maksim kualitas (*maxim of quality*), (c) maksim relevansi (*maxim of relevance*), (d) maksim pelaksanaan (*maxim of manner*). Berikut uraian prinsip kerja sama Grice selengkapnya.

2.3.1.1 Maksim Kuantitas (*Maxim of Quantity*)

Maksim kuantitas menyatakan *berikan informasi dalam jumlah yang tepat.* Maksim ini terdiri atas dua prinsip khusus. Satu prinsip berbentuk pernyataan

positif dan yang lainnya berupa pernyataan negatif. Kedua prinsip itu adalah (1) buatlah sumbangan informasi yang Anda berikan sesuai dengan yang diperlukan; (2) janganlah Anda memberikan sumbangan informasi lebih daripada yang diperlukan.

Maksim kuantitas ini memberikan tekanan pada tidak dianjurkannya pembicara untuk memberikan informasi lebih daripada yang diperlukan. Hal ini didasari asumsi bahwa informasi lebih tersebut hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga. Lebih dari itu, kelebihan informasi tersebut dapat dianggap sebagai sesuatu yang disengaja untuk memberikan efek tertentu, misalnya tuturan berikut.

(27) *Sapi milik pak kepala sekolah melahirkan.*

(28) *Sapi yang betina milik pak kepala sekolah melahirkan.*

Tuturan (27) lebih ringkas dan tidak menyimpang dari nilai kebenaran. Semua orang tahu bahwa kambing yang melahirkan adalah kambing betina. Jadi kata betina pada kalimat (28) termasuk berlebihan dan menyimpang dari maksim kuantitas.

2.3.1.2 Maksim Kualitas (*Maxim of Quality*)

Maksim kualitas menyatakan *usahakan agar informasi Anda benar*. Maksim ini juga terdiri atas dua prinsip sebagai berikut: jangan mengatakan sesuatu yang Anda yakini bahwa hal itu tidak benar; jangan mengatakan sesuatu yang bukti kebenarannya kurang meyakinkan.

Dengan maksim ini seorang peserta tutur diharapkan dapat menyampaikan sesuatu yang nyata dan sesuai dengan fakta sebenarnya di dalam bertutur. Fakta itu harus

didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang jelas. Berikut contoh maksim kualitas.

(29) *Silahkan menyontek, biar nanti saya mudah menilainya!*

(30) *Jangan menyontek, jika ingin lulus!*

Tuturan (30) jelas lebih memungkinkan terjadinya kerja sama antara penutur dengan mitra tutur. Tuturan (29) dikatakan melanggar maksim kualitas karena penutur mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan seseorang. Merupakan suatu kejanggalan apabila di dalam dunia pendidikan terdapat seorang guru yang mempersilahkan para siswanya melakukan penyontekan pada saat ujian berlangsung.

2.3.1.3 Maksim Relevansi (*Maxim of Relevance*)

Maksim relevansi menyatakan *usahakan agar perkataan yang Anda lakukan ada relevansinya*. Dalam maksim ini dinyatakan bahwa agar terjalin kerja sama yang baik antara penutur dan mitra tutur, masing-masing hendaknya dapat memberikan kontribusi yang relevan tentang sesuatu yang sedang dipertuturkan itu. Bertutur dengan tidak memberikan kontribusi yang demikian dianggap tidak mematuhi dan melanggar prinsip kerja sama, misalnya tuturan (31) antar seorang direktur dengan sekretarisnya berikut.

(31) Kepala Sekolah : *Bawa sini semua berkasnya akan saya tanda tangani dulu!*

Staf TU : *Maaf Pak, kasihan sekali nenek tua itu.*

Dalam percakapan (31) tampak dengan jelas bahwa tuturan sang staf tidak memiliki relevansi dengan apa yang diperintahkan sang kepala sekolah. Ia malah memberitahukan sang kepala sekolah bahwa ada nenek tua yang telah menunggunya lama untuk dilayani. Dengan demikian, tuturan (31) dapat dipakai

sebagai salah satu bukti bahwa maksim relevansi dalam prinsip kerja sama tidak selalu harus dipenuhi dan dipatuhi dalam pertuturan sesungguhnya. Hal seperti itu dapat dilakukan, khususnya, apabila tuturan tersebut dimaksudkan untuk mengungkapkan maksud-maksud tertentu yang khusus sifatnya.

2.3.1.4 Maksim Cara (*Maxim of Manner*)

Maksim cara menyatakan *usahakan agar Anda berbicara dengan teratur, ringkas, dan jelas*. Secara lebih rinci maksim ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Hindari ketidakjelasan/ kekaburan ungkapan;
2. Hindari ambiguitas makna;
3. Hindari kata-kata berlebihan yang tidak perlu;
4. Anda harus berbicara dengan teratur.

Orang bertutur dengan tidak mempertimbangkan hal-hal itu dapat dikatakan melanggar prinsip kerja sama Grice karena tidak mematuhi maksim pelaksanaan.

Berikut contoh maksim pelaksanaan.

- (32) Anak : *Yah, Besok saya pulang ke Karang.*
 Ayah : *Itu sudah Ayah siapkan, tinggal minta sama ibu.*

Dalam percakapan (32) tampak bahwa tuturan yang dituturkan sang anak relatif kabur maksudnya. Maksud yang sebenarnya dari tuturan sang anak itu, bukan hanya ingin memberi tahu kepada sang ayah bahwa ia akan segera kembali ke Karang, melainkan lebih dari itu, yakni bahwa ia sebenarnya ingin menanyakan apakah sang ayah sudah siap dengan sejumlah uang yang sudah diminta sebelumnya.

Maksim-maksim dalam prinsip kerja sama yang dinyatakan oleh Grice tersebut bukanlah hukum ilmiah tetapi hanyalah sebuah norma yang digunakan dalam memperoleh tujuan percakapan. Tujuan percakapan tersebut tidak akan terlalu berarti apabila salah satu maksim tersebut tidak terpenuhi secara maksimal. Levinson menyatakan bahwa maksim-maksim tersebut digunakan untuk menunjukkan kepada para partisipan apa yang harus mereka lakukan agar nantinya terdapat informasi yang efektif, efisien, rasional, dan memenuhi sifat kerja sama dalam percakapan.

Leech (dalam Rosidi, 2008) berpendapat bahwa prinsip kerja sama dibutuhkan untuk memudahkan penjelasan hubungan antara makna dan daya. Penjelasan demikian sangat memadai, khususnya untuk memecahkan masalah yang timbul di dalam semantik yang menggunakan pendekatan berdasarkan kebenaran. Akan tetapi, prinsip kerja sama itu sendiri tidak mampu menjelaskan mengapa seseorang sering menggunakan cara yang tidak langsung di dalam menyampaikan maksud. Prinsip kerja sama juga tidak dapat menjelaskan hubungan antara makna dan daya dalam kalimat nondeklaratif. Untuk mengatasi kelemahan itu, Leech mengajukan prinsip lain di luar prinsip kerja sama, yang dikenal dengan Prinsip Sopan Santun.

2.3.2 Prinsip Sopan Santun

Setelah mengemukakan keempat maksim kerjasama, Grice (dalam Rosidi, 2008) juga menyebutkan adanya aturan lain yang bersifat sosial, estetis, dan moral yang biasanya diikuti orang dalam melakukan percakapan. Misalnya, *'Anda harus*

sopan’ yang kemudian juga dapat melahirkan implikatur percakapan. Aturan kesopanan itu oleh Leech dinilai tidak setingkat dengan maksim prinsip kerja sama dan dapat ditambahkan saja ke dalam empat maksim Grice. Aturan itu merupakan dasar pemakaian bahasa tersendiri, yang disebut Prinsip Sopan Santun. Di samping itu, kehadiran prinsip sopan santun ini diperlukan untuk menjelaskan dua hal berikut.

- 1) Mengapa orang sering menggunakan cara yang tidak langsung (*indirect speech acts*) untuk menyampaikan pesan yang mereka maksudkan, dan
- 2) Hubungan antara arti (dalam semantik konvensional) dengan maksud atau nilai (dalam pragmatik situasional) dalam kalimat-kalimat yang bukan pernyataan (*non-declarative*).

Karena dua hal tersebut prinsip sopan santun tidak dianggap hanya sebagai prinsip yang sekedar pelengkap, tetapi lebih dari itu, prinsip sopan santun merupakan prinsip percakapan yang memiliki kedudukan yang sama dengan prinsip percakapan yang lain. (Rusminto, 2009: 93)

Tarigan (2009: 73) menerjemahkan prinsip sopan santun yang dikemukakan oleh Leech dengan ungkapan-ungkapan lain, yaitu kebijaksanaan, kedermawanan, penghargaan, kesederhanaan, permufakatan, dan simpati. Berikut uraian prinsip kerjasama yang dikemukakan Leech (dalam Rahardi, 2005: 60) selengkapnya.

2.3.2.1 Maksim Kebijaksanaan (*Tact Maxim*)

Maksim ini mengandung prinsip sebagai berikut: (1) buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin; (2) buatlah keuntungan orang lain sebesar mungkin. Orang

bertutur yang berpegang dan melaksanakan maksim kebijaksanaan akan dapat dikatakan sebagai orang santun.

Berikut contoh penerapan maksim kebijaksanaan.

- (33) Ani : *Ayo, dimakan browniesnya! Aku udah makan kok tadi.*
 Tina : *Wah, legit sekali. Siapa yang membuat ini An?*

Pemaksimalan keuntungan bagi pihak mitra tutur tampak sekali pada tuturan Ani. Tuturan itu disampaikan kepada temannya sekalipun sebenarnya satu-satunya bekal yang dibawa Ani adalah apa yang disajikan kepada Tina. Sekalipun, sebenarnya sudah tidak ada, namun Ani berpura-pura mengatakan bahwa ia telah makan brownies itu. Tuturan itu disampaikan dengan maksud agar Tina merasa bebas dan dengan senang hati menikmati hidangan yang disajikan itu tanpa ada perasaan tidak enak sedikitpun.

2.3.2.2 Maksim Kedermawanan (*Generosity Maxim*)

Maksim ini mengandung prinsip sebagai berikut: (1) buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin; (2) buatlah kerugian diri sendiri sebesar mungkin. Dengan maksim kedermawanan atau maksim kemurahan hati, para peserta tutur diharapkan dapat menghormati orang lain. Penghormatan terhadap orang lain akan terjadi apabila penutur melaksanakan kedua prinsip yang terdapat dalam maksim tersebut. Berikut contoh penerapan maksim kedermawanan.

- (34) A : *Wah, penaku ketinggalan di rumah.*
 B : *Pakai penaku aja saya punya dua. Sebentar, saya ambilkan dulu!*

Dari tuturan (34) yang disampaikan si B , dapat dilihat dengan jelas bahwa ia berusaha memaksimalkan keuntungan pihak lain, yaitu si A dengan cara

memberikan secara cuma-cuma sesuatu yang dimilikinya. Hal itu dilakukan dengan cara menawarkan penanya kepada si A.

2.3.2.3 Maksim Penghargaan (*Approbation Maxim*)

Maksim ini mengandung prinsip sebagai berikut: (1) kecamlah orang lain sesedikit mungkin; (2) pujilah orang lain sebanyak mungkin. Dengan maksim ini, diharapkan agar para peserta pertuturan tidak saling mengejek, saling mencaci, atau saling merendahkan pihak yang lain. Peserta tutur yang sering mengejek peserta tutur lain di dalam kegiatan bertutur akan dikatakan sebagai orang yang tidak sopan. Dikatakan demikian, karena tindakan mengejek merupakan tindakan tidak menghargai orang lain. Karena merupakan perbuatan tidak baik, perbuatan itu harus dihindari dalam pergaulan sesungguhnya. Berikut contoh penerapan maksim kedermawanan.

- (35) Siswa A: *Bro, aku tadi praktik mata pelajaran seni lho.*
 Siswa B: *Iya, saya liat pas kamu tampil. Bagus sekali.*

Tuturan (35) dituturkan oleh seorang siswa kepada temannya yang juga seorang siswa dalam ruang kelas pada sebuah sekolah menengah atas. Pemberitahuan yang disampaikan siswa A terhadap rekannya siswa B pada contoh (35), ditanggapi dengan sangat baik bahkan disertai dengan pujian atau penghargaan oleh siswa B. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di dalam pertuturan itu siswa B berperilaku santun terhadap siswa A.

2.3.2.4 Maksim Kesederhanaan (*Modesty Maxim*)

Maksim ini mengandung prinsip sebagai berikut: (1) pujilah diri sendiri sesedikit mungkin; (2) kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin. Dengan demikian peserta

tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati. Dalam masyarakat bahasa dan budaya Indonesia, kesederhanaan dan kerendahan hati banyak digunakan sebagai parameter penilaian kesantunan seseorang. Berikut contoh penerapan maksim kesederhanaan.

- (36) Kepala Sekolah : *Nanti Bapak yang menjadi pembina upacara ya!*
 Guru A : *Waduh, ... nanti grogi saya.*

Tuturan (36) dituturkan oleh kepala sekolah kepada salah satu guru ketika mereka bersama-sama menuju ke lapangan upacara. Guru A bersikap rendah hati dengan cara mengecam diri sendiri. Ia menyatakan grogi apabila berbicara di depan umum. Dengan demikian, ia menerapkan maksim kesederhanaan dalam tuturannya.

2.3.2.5 Maksim Permufakatan (*Agreement Maxim*)

Maksim ini mengandung prinsip sebagai berikut: (1) usahakan agar ketidaksepakatan antara diri sendiri dan orang lain terjadi sesedikit mungkin; (2) usahakan agar kesepakatan antara diri sendiri dan orang lain terjadi sebanyak mungkin. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah percakapan sedapat mungkin penutur dan mitra tutur menunjukkan kesepakatan tentang topik yang dibicarakan. Jika itu tidak mungkin, penutur hendaknya berusaha kompromi dengan melakukan ketidaksepakatan sebagian, sebab bagaimanapun ketidaksepakatan sebagian sering lebih disukai daripada ketidaksepakatan sepenuhnya. Apabila terdapat kemufakatan atau kecocokan antara diri penutur dan mitra tutur dalam kegiatan bertutur, masing-masing dari mereka akan dapat dikatakan bersikap santun. Berikut ini contoh-contoh untuk memperjelas uraian tersebut.

- (37) A: *Pentas seninya meriah sekali, bukan?*
B: *Tidak, pentas seninya sama sekali tidak meriah.*
- (38) A: *Semua orang menginginkan keterbukaan.*
B: *Ya pasti.*
- (39) A: *Bahasa Indonesia sangat mudah dipelajari.*
B: *Betul, tetapi tata bahasanya cukup sulit.*

Contoh (37) memperlihatkan ketidaksepakatan antara penutur dan mitra tutur, dan karenanya melanggar maksim kesepakatan. Contoh (38) merupakan contoh percakapan yang menunjukkan penerapan maksim kesepakatan. Sementara itu, contoh (39) merupakan percakapan yang memperlihatkan adanya ketidaksepakatan sebagian.

2.3.2.6 Maksim Simpati (*Sympathy Maxim*)

Maksim ini mengandung prinsip sebagai berikut: (1) kurangilah rasa antipati antara diri sendiri dengan orang lain hingga sekecil mungkin; (2) tingkatkan rasa simpati sebanyak-banyaknya antara diri sendiri dan orang lain. Hal ini berarti bahwa semua tindak tutur yang mengungkapkan rasa simpati kepada orang lain merupakan sesuatu yang berarti untuk mengembangkan percakapan yang memenuhi prinsip sopan santun. Tindak tutur yang mengungkapkan rasa simpati tersebut misalnya ucapan selamat, ucapan bela sungkawa, dan ucapan lain yang menunjukkan penghargaan terhadap orang lain. Berikut contoh penerapan maksim simpati.

- (40) Anto: *Ti, kakekku meninggal dunia semalam. Jadi aku gak bisa ikut pergi. Maaf ya Ti.*
Anti: *O, turut berduka cita ya To. Iy, nanti saya sampaikan pada teman-teman.*

Tuturan (40) mematuhi maksim simpati, yakni Anti memberikan simpati kepada Anto yang sedang berduka dengan ucapan bela sungkawa. Hal ini karena kakek Anto meninggal dunia.

2.4 Konteks

Sebuah peristiwa tutur selalu terjadi dalam konteks tertentu. Artinya, peristiwa tutur tertentu selalu terjadi pada waktu tertentu, tempat tertentu, untuk tujuan tertentu, dan sebagainya. Oleh karena itu, analisis terhadap peristiwa tutur tersebut sama sekali tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melatarinya (Rusminto, 2010: 55). Speber dan Wilson (dalam Rusminto, 2010: 55) mengemukakan bahwa kajian terhadap penggunaan bahasa harus memperhatikan konteks yang seutuhnya. Mereka menyatakan bahwa untuk memperoleh relevansi secara maksimal, kegiatan berbahasa harus melibatkan dampak kontekstual yang melatarinya. Semakin besar dampak kontekstual sebuah percakapan, semakin besar pula relevansinya.

Besarnya perananan konteks bagi pemahaman sebuah tuturan dapat dibuktikan dengan adanya kenyataan bahwa sebuah tuturan seperti pada contoh (41) berikut dapat memiliki maksud yang berbeda jika terjadi pada konteks yang berdeda.

(41) *Coba lihat cat dinding ruang kelas kita ini!*

Tuturan pada contoh (36) dapat mengandung maksud “menyuruh siswanya untuk mengecat dinding ruang kelas” jika disampaikan dalam konteks warna cat di dinding ruang kelas tersebut sudah pudar warnanya , apabila tidak dicat akan mengganggu suasana belajar dan pada saat itu ada jatah cat dari sekolah.

Sebaliknya, tuturan tersebut dapat mengandung maksud “memamerkan cat dinding kepada muridnya” jika disampaikan dalam konteks sang guru baru saja menyuruh tukang untuk mengecat ruang kelas mereka, ruangan tersebut terlihat menjadi lebih indah dari sebelumnya.

Dalam kaitannya dengan hal ini, Grice (dalam Rusminto, 2009: 57) mengemukakan bahwa konteks adalah latar belakang pengetahuan yang sama-sama dimiliki oleh penutur dan mitra tutur yang memungkinkan mitra tutur untuk memperhitungkan implikasi tuturan dan memaknai arti tuturan dari si penutur.

Sementara itu, Kleden (dalam Sudaryat, 2009: 141) mengemukakan bahwa konteks adalah ruang dan waktu yang spesifik yang dihadapi seseorang atau kelompok orang. Sejalan dengan pendapat tersebut, Schifffrin (dalam Rusminto, 2009: 54) menyatakan bahwa konteks adalah sebuah dunia yang diisi orang-orang yang memproduksi tuturan-tuturan. Orang-orang yang memiliki komunitas sosial, kebudayaan, identitas pribadi, pengetahuan, kepercayaan, tujuan, dan keinginan, dan yang berinteraksi satu dengan yang lain dalam berbagai macam situasi yang baik yang bersifat sosial maupun budaya. Dengan demikian, konteks tidak saja berkenaan dengan pengetahuan, tetapi merupakan suatu rangkaian lingkungan di mana tuturan dimunculkan dan diinterpretasikan sebagai realisasi yang didasarkan pada aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat pemakai bahasa.

2.4.1 Unsur-unsur Konteks

Dalam kaitan dengan konteks, Hymes (dalam Chaer dan Agustina, 2004: 48) menyatakan bahwa unsur-unsur konteks mencakup berbagai komponen yang disebutnya dengan akronim *speaking*. Akronim ini dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) *Setting and scene*. *Setting* berkenaan dengan waktu dan tempat tutur berlangsung, sedangkan *scene* mengacu pada situasi tempat dan waktu atau situasi psikologis pembicaraan. Waktu, tempat, dan situasi tuturan yang berbeda dapat menyebabkan penggunaan variasi bahasa yang berbeda. Berbicara di lapangan sepak bola pada waktu ada pertandingan sepak bola dalam situasi yang ramai tentu berbeda dengan pembicaraan di ruang perpustakaan pada waktu banyak orang membaca dan dalam keadaan sunyi. Di lapangan sepak bola kita bisa berbicara keras-keras, tapi di ruang perpustakaan harus seperlahan mungkin.
- 2) *Participants* adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima (pesan). Dua orang yang bercakap-cakap dapat berganti peran sebagai pembicara atau pendengar, tetapi dalam khotbah di masjid, khotib sebagai pembicara dan jemaah sebagai pendengar tidak dapat bertukar peran. Status sosial partisipan sangat menentukan ragam bahasa yang digunakan. Misalnya, seorang anak akan menggunakan ragam atau gaya bahasa yang berbeda bila berbicara dengan orang tuanya atau gurunya bila dibandingkan kalau dia berbicara terhadap teman-teman sebayanya.

- 3) *Ends*, merujuk pada maksud dan tujuan pertuturan. Peristiwa tutur yang terjadi di ruang pengadilan bermaksud untuk menyelesaikan suatu kasus perkara; namun, para partisipan di dalam peristiwa tutur itu mempunyai tujuan yang berbeda. Jaksa ingin membuktikan kesalahan si terdakwa, pembela berusaha membuktikan bahwa si terdakwa tidak bersalah, sedangkan hakim berusaha memberikan keputusan yang adil.
- 4) *Act sequences*, mengacu pada bentuk dan isi ujaran. Bentuk ujaran ini berkenaan dengan kata-kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya, dan hubungan antara apa yang dikatakan dengan topik pembicaraan. Bentuk ujaran dalam kuliah umum, dalam percakapan biasa, dan dalam pesta adalah berbeda. Begitu juga dengan isi yang dibicarakan.
- 5) *Keys*, mengacu pada nada, cara, dan semangat pada saat suatu pesan disampaikan; dengan senang hati, dengan serius, dengan singkat, dengan sombong, dengan mengejek, dan sebagainya. Hal ini dapat juga ditunjukkan dengan gerak tubuh dan isyarat.
- 6) *Instrumentalities*, mengacu pada jalur bahasa yang digunakan, seperti jalur lisan, tulisan, melalui telegraf atau telepon.
- 7) *Norms*, yaitu norma-norma yang digunakan dalam interaksi yang sedang berlangsung. Misalnya, yang berhubungan dengan cara berinterupsi, bertanya, menyapa, dan sebagainya.
- 8) *Genres*, mengacu pada jenis bentuk penyampaian, seperti narasi, puisi, pepatah, doa, dan sebagainya.

2.4.2 Peranan Konteks dalam Komunikasi

Sebuah peristiwa tutur selalu terjadi dalam konteks tertentu. Artinya, peristiwa tutur tertentu selalu terjadi pada waktu tertentu, tempat tertentu, untuk tujuan tertentu, dan sebagainya. Oleh karena itu, analisis terhadap peristiwa tutur tersebut sama sekali tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melatarinya (Rusminto, 2009: 60).

Schiffirin (dalam Rusminto, 2009: 61) menyatakan bahwa konteks memainkan dua peran penting dalam teori tindak tutur. Dua peran penting itu adalah (1) sebagai pengetahuan abstrak yang mendasari bentuk tindak tutur; dan (2) suatu bentuk lingkungan sosial di mana tuturan-tuturan dapat dihasilkan dan diinterpretasikan sebagai realitas aturan-aturan yang mengikat.

Sementara itu, Hymes (dalam Rusminto, 2009: 63) menyatakan bahwa peranan konteks dalam penafsiran tampak pada kontribusinya dalam membatasi jarak perbedaan tafsiran terhadap tuturan dan menunjang keberhasilan pemberian tafsiran terhadap tuturan tersebut. Konteks dapat menyingkirkan makna-makna yang tidak relevan dari makna-makna yang seharusnya sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang layak dikemukakan berdasarkan konteks situasi tertentu. Sejalan dengan pandangan tersebut, Kartomihardjo (dalam Rusminto, 2009: 63) mengemukakan bahwa konteks situasi sangat menentukan bentuk bahasa yang digunakan dalam berinteraksi. Bentuk bahasa yang telah dipilih oleh seorang penutur dapat berubah apabila situasi yang melatarinya berubah.

2.5 Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA

Bahasa dan sastra Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Di Sekolah Menengah Atas (SMA) misalnya, mata pelajaran tersebut merupakan salah satu mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Nasional. Hal ini tampak bahwa mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia memiliki peranan yang sangat penting karena dijadikan sebagai salah satu syarat kelulusan siswa.

Secara umum tujuan pembelajaran Bahasa dan Bastra Indonesia di SMA adalah sebagai berikut.

- a. Siswa menghargai dan bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan (Nasional) dan bahasa negara.
- b. Siswa memahami bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, dan fungsi, serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk bermacam-macam tujuan, keperluan, dan keadaan.
- c. Siswa memiliki kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan intelektual, kematangan emosional, dan kematangan sosial.
- d. Siswa menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia.

Berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), program pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia mengenai implikatur percakapan ditemukan pada kompetensi mengenai pembelajaran bahasa khususnya kompetensi berbicara. Pada kelas X semester ganjil terdapat standar kompetensi mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi melalui kegiatan berkenalan, berdiskusi, dan

bercerita, sedangkan kompetensi dasarnya mendiskusikan masalah (yang ditemukan dari berbagai berita, artikel, atau buku), pada kelas XI semester genap terdapat standar kompetensi menyampaikan laporan hasil penelitian dalam diskusi atau seminar, sedangkan kompetensi dasarnya mengomentari pendapat seseorang dalam suatu diskusi atau seminar. Kemudian pada kelas XII semester ganjil terdapat standar kompetensi mengungkapkan gagasan, tanggapan, dan informasi dalam diskusi, sedangkan kompetensi dasarnya menyampaikan gagasan dan tanggapan dengan alasan yang logis dalam diskusi

Berdasarkan program tersebut, sumber belajar yang dapat digunakan adalah media masa, buku, dan internet. Tujuan dari kompetensi dasar ini adalah siswa mampu menanggapi masalah yang ditemukan dan mencari solusi dengan metode diskusi dan menggunakan bahasa yang tepat dan sopan. Siswa dituntut untuk memperhatikan konteks selama diskusi berlangsung. Dengan demikian, makna yang disampaikan secara tak langsung akan dimengerti oleh siswa.